

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P. J. A. (dalam Ariffin & Sitabuana, 2022). *Definisi Pajak menurut Ahli Perpajakan*. Dalam: Ariffin & Sitabuana.
- Ariffin, R. A., & Sitabuana, T. (2022). *Pengantar Perpajakan: Konsep, Asas, dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. (2023). *Profil Pajak Daerah DKI Jakarta Tahun 2023*. Jakarta: Bapenda DKI Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi. (2022). *Kota Jambi dalam Angka 2022*. Jambi: BPS Kota Jambi.
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. (2023). *Laporan Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023*. Jambi: BPPRD Kota Jambi.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1983). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Indonesia. (2000). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Instruksi Wali Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penertiban Reklame Tanpa Izin.
- Kamal, M. (2021). *Perpajakan Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, D. (2021). *Analisis Pengelolaan Pajak Reklame di Era Digital: Studi Kasus Kota Jambi*. *Jurnal Ilmu Administrasi Daerah*, 9(2), 112–125.

- Marihot, P. Sinhaan. (2013). *Pajak Daerah: Teori dan Praktik dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Kota Jambi. (2016). *Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda No. 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Kota Jambi. (2019). *Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.
- Pratiwi, S., & Fauzan, R. (2020). *Efektivitas Pengawasan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 45–60.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, R. (dalam Ariffin & Sitabuana, 2022). *Definisi Pajak menurut Ahli Perpajakan*. Dalam: Ariffin & Sitabuana.
- Sujatmiko, B. (2021). *Permasalahan Kepatuhan Wajib Pajak Reklame: Studi di Kota Jambi*. *Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah*, 5(2), 89–101.
- Suryono, B. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).